

Tony Rosyid: Gara-Gara "New Normal", Indonesia Gak Kunjung Normal

Tony Rosyid - INDONESIASATU.CO.ID

Sep 22, 2020 - 17:52



OPINI - Memang, tak mudah bagi setiap negara menghadapi wabah covid-19. Terutama yang telat menyadarinya. Indonesia, misalnya. Tergopoh-gopoh saat virus menyerang. Bayangkan musuh datang dan anda gak punya persiapan. Empon-empon model apapun, gak akan tahan.

Yang jengkelin, sudah salah prediksi, telat antisipasi, keliru kalkulasi, gagap, panik, lalu kirim pasukan buzzer untuk membuat narasi-narasi pembenaran. Koplak!

Tak perlu ada dilema antara pandemi dan ekonomi. Semua program bisa bersinergi, asal ngerti masalah dan serius menangani.

Karantina wilayah, itu ide jitu. Pandemi bisa dibatasi, ekonomi akan segera dapat diatasi. Di awal pandemi, ada kepala daerah yang mengusulkan gagasan karantina ini. Tepatnya tanggal 29 Maret. Tanggal 30 Maret diterima, langsung ditolak. Buru-buru sekali. Pada hari itu juga. Itu otoritas pusat, katanya. Tahu! Itu memang otoritas pusat. Makanya, diusulin, bukan diputusin.

Akhirnya, ketemulah istilah PSBB. Mirip karantina juga sih. Meski telat, ini kebijakan sangat tepat. April-Mei, ketika PSBB diberlakukan, kasus terinveksi covid-19 bisa ditekan. Rata-rata perhari 445, dengan tingkat kematian rata-rata 26 orang setiap hari.

Tanggal 14 April, Jokowi posting video. Wacanakan tatanan hidup baru. Bahasa inggrisnya "New Normal" 15 Mei Jokowi pidato di Istana. Diantara isi pidato Jokowi: "Dan kita memang harus berkomprimi dengan covid, bisa hidup berdampingan dengan covid, yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan covid, karena informasi dari WHO yang saya terima meskipun kurvanya agak melandai, atau nanti berkurang, tapi virus ini tak akan hilang. Artinya, sekali lagi kita harus berdampingan hidup dengan covid. Sekali lagi yang penting masyarakat produktif dan aman dari covid".

Entah dapat ide dan gagasan dari mana pemerintah membuat wacana New Normal. Gak sabar. Terlalu terburu-buru. Panik yang gak perlu. Berlebihan takutnya terhadap "bayangan" dampak ekonomi, tanpa dikalkulasi dari banyak sisi. Ingin segera normal kembali tanpa rasionalitas untuk antisipasi.

Apa yang terjadi? Semua ambyar! Saat itu saya bilang: "ini Herd Imunity". Siapa yang kuat akan hidup, siapa yang lemah, bakal kelar.

Terbukti! Kasus covid-19 naik drastis. Juni naik jadi 1.141 perhari. Juli naik 1.714 perhari. Agustus naik 2300 perhari. Dan September di atas 3000. 16 September kemarin kasus naik hampir 4000 sehari. Tepatnya 3.963 orang.

Jika April-Mei yang mati perhari 26 orang, Juni naik jadi 49 orang. Juli 73 orang. Agustus 80 orang. September ini, tingkat kematian di atas 100 orang per hari. Tanggal 16 September kemarin, ada 135 orang mati karena covid-19. Dan trend angkanya terus naik. Ngeri dah!

Anehnya, ketika kasus covid-19 naik signifikan di bulan Juni, persis pasca New Normal dimunculkan, dan terus naik di bulan juli, kenapa pemerintah gak melakukan evaluasi? Mengapa tidak segera tarik rim darurat? Lalu apa gunanya data kalau gak dievaluasi dan jadi referensi kebijakan? Sampai disini, rakyat betul-betul gak paham.

Dan ketika di bulan September kenaikan kasus covid-19 semakin tak terkendali, ada kepala daerah melakukan evaluasi dan berinisiatif tarik rim darurat, justru

diberi peringatan. Dibully dan diserang habis-habisan. Ini ada apa?

Saat berlakukan New Normal, apakah pemerintah tidak mempertimbangkan watak "tidak disiplin" masyarakat. Kok salahkan masyarakat? Tidak! Mereka juga korban dari elit dan pemimpin yang terbiasa tidak disiplin. Sudah jadi tabiat dari rezim ke rezim. Turun temurun.

Masyarakat tidak disiplin hampir dalam semua hal. Diantaranya hukum. Kalau penegak hukum gak disiplin, bagaimana masyarakat bisa disiplin? Teorinya: "Hukum yang tidak ditegakkan dengan baik akan melahirkan masyarakat yang tidak disiplin".

Coba saja "tilang" diberlakukan dengan ketat di jalan raya, pelanggaran lalu lintas "pasti" akan berkurang. Drastis! Jika tak ada makelar kasus, kriminalitas akan turun. Kalau UU Pemilu ditegakkan, pelanggaran pemilu akan surut. Belum lagi praktek hukum "tebang pilih", yang makin merusak kedisplinan masyarakat.

Andai saja New Normal dibarengi dengan operasi yustisi, hukum ditegakkan dengan memberi sanksi kepada masyarakat yang mengabaikan protab kesehatan covid-19, maka Indonesia saat ini gak perlu banyak jatuh korban.

Setelah ratusan orang mati perhari, baru bicara UU No 4/1984 tentang kemungkinan penerapan sanksi pidana dan denda bagi yang mengabaikan protab kesehatan. Minta pergub, perbup dan perwali dijadikan perda, supaya ada sanksi. Anda bercanda pak?

Bukannya kalau kasus covid-19 naik, itu lahan bisnis yang menggiurkan? Tidakkah ini menguntungkan untuk bisnis masker dan APD (Alat Pelindung Diri), dengan semua turunannya? Terutama bagi penyedia vaksin. Sudah keluar modal dan investasi besar, lalu gak ada yang terpapar corona, bandar bisa tekor.. Ah, gelap! Jangan ada yang memancing di air keruh. Ora elok!

Disiplin, ini jadi masalah bagi masyarakat akibat penegakan hukum yang bermasalah. Terhadap masyarakat yang sedang belajar disiplin karena covid-19, New Normal muncul. Mendadak semuanya berubah. 3 M: Memakai masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan mulai diabaikan.

Saat kasus covid-19 perhari dibawah 500 orang, sekitar bulan Maret-Mei, masyarakat waspada dan takut terhadap corona. Orang-orang gak keluar rumah kecuali kebutuhan urgent. Gang-gang RT dan RW diportal.

New Normal muncul. PSBB diperlonggar. Kasus naik. Semakin hari makin tinggi jumlahnya. Bertambah hingga hampir 4000-an orang perhari, dengan tingkat kematian di atas 100 orang setiap harinya.

Meski semakin besar ancaman penyebarannya, masyarakat merasa aman-aman saja. Ramai beraktifitas di luar rumah. No masker. No cuci tangan. No jaga jarak. Cafe-Cafe dan restoran penuh. Mall-mall berjejal orang belanja. Jalanan padat. Orang-orang berkerumun lagi. Normal kembali, seperti gak ada penyebaran covid-19. Ini terjadi sejak makhluk bernama "New Normal" lahir. Dan saat itu, nyawa rakyat seperti tak penting lagi. Dihiraukan!

Gagasan New Normal telah mengakibatkan pertama, angka kasus covid-19 naik

terus, bahkan sangat tinggi. Kedua, ekonomi tetap terpuruk. Tangani ekonominya, tapi abaikan kesehatannya. Gagal! Semua langkah ekonomi seperti sia-sia. Ketiga, Indonesia dilock down 68 negara.

Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Gak ada satupun pejabat yang minta maaf!

Jakarta, 22 September 2020

Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa